

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1. Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata asing yaitu "accounting", yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dan dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

2.1.1.1. Pengertian Akuntansi

Menurut Dwi Martani dkk (2012:4) akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah bahasa bisnis (business language), akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi

akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang.”

Sedangkan pengertian akuntansi menurut Kieso, et al. (2014 : 4) adalah :

“Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.”

Menurut James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac (2012 : 9) akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.”

Dari definisi di atas, disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan dan melaporkan aktivitas atau transaksi suatu badan usaha yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut dalam bentuk informasi keuangan.

2.1.1.2. Jenis - Jenis Akuntansi

1. Akuntansi Keuangan

Bidang akuntansi yang secara khusus mempelajari tentang transaksi-transaksi keuangan seperti utang (kewajiban), modal (ekuitas), ataupun perubahan aset perusahaan.

2. Akuntansi Manajemen

Bidang akuntansi yang memberikan data real kepada pihak internal perusahaan (manajemen) untuk menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya.

3. Akuntansi Biaya

Bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengefisiensi biaya produksi ataupun biaya-biaya yang lain.

4. Akuntansi Pajak

Bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengurus perpajakan. Dalam hal ini untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan perusahaan tanpa menyalahi aturan yang berlaku.

5. Akuntansi Pemeriksaan

Bidang akuntansi berupa pemeriksaan atas laporan pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Akuntansi pemeriksaan ini biasa disebut dengan audit, dan orang yang mengaudit disebut auditor.

6. Akuntansi Pemerintahan

Bidang akuntansi yang mempelajari tentang penyajian data laporan keuangan atau financial statement yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, baik lembaga daerah atau pusat.

7. Sistem Akuntansi

Bidang akuntansi ini berhubungan dengan proses pembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukungnya, serta diikuti oleh penentuan langkah-langkah yang akan diambil kedepannya.

8. Akuntansi Internasional

Bidang akuntansi yang mempelajari masalah-masalah Internasional seperti perdagangan Internasional yang umum terjadi di perusahaan multinasional atau Internasional.

Dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Pemerintahan.

2.1.2. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.2.1. Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan

Definisi standar akuntansi pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu:

“Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar”.

Definisi standar akuntansi pemerintahan menurut Darise (2008) yaitu:

“Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan”.

Definisi standar akuntansi pemerintahan menurut Bastian (2010:137) yaitu:

“Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nordiawan et al, 2009:123) Menurut Mahmudi (2011:271) standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah manfaat standar akuntansi pemerintah: (1) standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah; (2) standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya; (3) standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan; (4) standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan; dan (5) standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai standar akuntansi pemerintahan menurut PP No. 71 Tahun 2010, Darise (2008) dan Bastian (2010:137), maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah karena mempunyai kekuatan hukum. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Bastian, 2010:139). Komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) terdiri dari komite konsultatif standar akuntansi pemerintahan (komite konsultatif) dan komite kerja standar akuntansi pemerintahan (komite kerja). Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP. KSAP menyampaikan konsep peraturan pemerintah tentang SAP kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi peraturan pemerintah (Jannaini, 2012).

2.1.2.2. Definisi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

Definisi implementasi standar akuntansi pemerintahan menurut Heni Nurani dkk (2014) yaitu:

“Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan daerah melalui penyajian informasi keuangan yang berkualitas”.

Definisi implementasi standar akuntansi pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu:

“Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah”.

Menurut Nordiawan dan Hertianti, (2010) Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat Internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku. SAP merupakan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite Standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi akuntansi berupa pengelolaan laporan keuangan daerah sehingga dalam penyajiannya dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.2.3. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu, badan akuntansi keuangan negara (BAKUN), kementerian keuangan, mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti dalam organisasi komersial (*commercial organization*), para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain (Siregar dan Siregar, 2011).

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut Nordiawan

(2009:23), beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan dengan baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun oleh pemerintah sendiri. Diperlukannya paket standar akuntansi tersendiri karena adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial, yang diantaranya adalah adanya kewajiban pertanggungjawaban kepada publik yang lebih besar atas penggunaan dana yang dimiliki.

Mahsun dkk (2007:11) menyebutkan di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, merupakan bagian dari organisasi sektor publik, sehingga diperlukan juga standar akuntansi tersendiri. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan *audit* di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintah yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordiawan dkk, 2007).

2.1.2.4. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat untuk

dipertanggungjawabkan. Standar akuntansi di perlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai dapat menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam proses pemeriksaan menurut Mardiasmo (2004:149).

2.1.2.5. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian - kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas – dinas nya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya serta akuntabilitas.

Menurut Fakhurrazi (2010:15) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga

dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.1.2.6. Jenis Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Rahayu, dkk (2014) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis yaitu:

1. SAP berbasis akrual

Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Melalui SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Suatu pemerintah yang menerapkan SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan.

2. SAP berbasis kas menuju akrual

SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

2.1.2.7. Prinsip – prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-Laporan Operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

b. Prinsip Nilai Histori

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

c. Prinsip Realisasi

Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

e. Prinsip Periodesitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.2.8. Dimensi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP pada

pemerintah daerah. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat dua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai berikut:

1. PSAP No. 01 (Penyajian Laporan Keuangan)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. PSAP No. 02 (Laporan Realisasi Anggaran)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan -LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

3. PSAP No. 03 (Laporan Arus Kas)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4. PSAP No. 04 (Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL) Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. PSAP No. 05 (Akuntansi Persediaan)

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan juga pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.

6. PSAP No. 6 (Akuntansi Investasi)

Dengan menggunakan metode biaya investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Kemudian dengan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan, untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

7. PSAP No. 07 (Akuntansi Aset Tetap)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

8. PSAP No. 08 (Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan)

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

9. PSAP No. 09 (Akuntansi Kewajiban)

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

10. PSAP No. 10 (Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan)

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan pernyataan standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL) Neraca, Laporan Operasional (LO),

Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

11. PSAP No. 11 (Laporan Keuangan Konsolidasian)

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

12. PSAP No. 12 (Laporan Operasional)

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

2.1.3. Sistem Informasi Akuntansi

2.1.3.1. Definisi Sistem Informasi

Definisi sistem informasi menurut Krismiaji (2010:4) yaitu:

“Sistem informasi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis.”

Definisi sistem informasi menurut Sutarman (2012:13) yaitu:

“Sistem informasi adalah sistem dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, intruksi) dan output (laporan, kalkulasi).”

Definisi sistem informasi menurut Azhar Susanto (2013:52) yaitu:

“Sistem informasi adalah kumpulan sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna.”

Definisi sistem informasi menurut Laudon dalam Azhar Susanto (2013:52) yaitu:

“Sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran aktivitas didalam perusahaan.”

Dari beberapa kutipan definisi sistem informasi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan serta bekerja sama untuk mendukung dalam pengambilan keputusan dan mengolah data menjadi informasi yang berguna.

2.1.3.2. Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Informasi sangat berperan dalam segala aspek kehidupan manusia baik secara individu maupun secara organisasi. Semakin baik kualitas informasi dimiliki oleh suatu organisasi maka semakin baik pula komunikasi yang terjadi didalamnya. Informasi berkualitas akan meningkatkan kualitas pemahaman para pengelola organisasi dalam melihat perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Melihat pentingnya informasi yang begitu tinggi maka organisasi menjadi sangat tergantung pada sistem informasi akuntansi. Informasi akuntansi akan

menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi pihak internal dan pihak eksternal khususnya untuk pengambilan keputusan.

Pada instansi pemerintah informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi internal meliputi pemerintahan itu sendiri seperti bendahara, kepala seksi, kepala bidang dan kepala dinas, sedangkan pihak eksternal meliputi inspektorat, BPK dan Bank. Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah untuk mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur dan berkualitas yaitu tepat waktu, relevan, lengkap dan akurat.

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:72) yaitu:

“Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadani (2011:58) yaitu:

“Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi yang mencakup siklus pemrosesan transaksi, pengguna teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi.”

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2009:124) yaitu:

“Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan di bidang keuangan.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari suatu sumber daya yang terdiri dari manusia dan peralatan, yang di dalamnya terdapat data sebagai suatu input kemudian diolah menjadi output berupa informasi berbentuk suatu laporan keuangan yang kemudian dikomunikasikan kepada berbagai pihak untuk pengambilan keputusan.

2.1.3.3. Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Seperti yang dikemukakan oleh Barry E. Cushing dialihbahasakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001:28) mengenai sistem informasi akuntansi maka dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut :

1. “Kegunaan (*usefulness*), suatu sistem harus dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu, relevan dengan pengambilan keputusan yang dibuat oleh manajemen serta pelaksanaan operasi pegawai;
2. Ekonomis (*economy*), seluruh kegiatan dari sistem termasuk laporan, pengendalian serta alat – alat harus memberikan kontribusi nilai keuntungan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan;
3. Keandalan (*reliability*), hasil keluaran (output) dari sistem informasi tersebut harus mempunyai tingkat kegunaan yang tinggi dan sistem tersebut harus dapat beroperasi secara efektif;
4. Pelayanan Pelanggan (*customer service*), sistem informasi harus dapat memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada pelanggan;
5. Kapasitas (*capacity*), kapasitas dari suatu sistem harus cukup untuk dapat menangani saat – saat dimana aktivitas operasi mengalami kenaikan, sebagaimana halnya pada saat aktivitas operasi berada dalam keadaan normal;
6. Kesederhanaan (*simplicity*), suatu sistem harus dirancang dengan cukup sederhana sehingga struktur dan operasinya dapat dengan mudah dimengerti serta prosedurnya mudah untuk dilaksanakan;
7. Fleksibilitas (*flexibility*), suatu sistem harus cukup fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya kondisi yang berubah ataupun adanya keperluan lain dalam organisasi.”

2.1.3.4. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam memenuhi kebutuhan informasi baik untuk kebutuhan pihak internal maupun pihak eksternal, sistem informasi harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada pihak – pihak yang terkait dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian.

Menurut Azhar Susanto (2013:8), tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Bagi suatu perusahaan, sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data keuangan yang berasal dari berbagai macam sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam penilaian. Pemakai informasi tersebut dapat berasal dari dalam perusahaan seperti manajer atau dari luar seperti pelanggan dan pemasok.”

Adapun tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi menurut Mardi (2011:4) yaitu:

1. “Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada seseorang (*to fulfill obligations relating to stewardship*). Pengelolaan selalu mengacu kepada tanggung jawab manajemen guna menata secara jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki. Keberadaan sistem membantu ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan yang diminta lainnya, demikian pula ketersediaan laporan internal yang dibutuhkan oleh seluruh jajaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan.
2. Setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen (*to support decision making by internal decision makers*). Sistem informasi menyediakan informasi guna mendukung setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan sesuai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan.

3. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional sehari – hari (*to support the day to day operations*). Sistem informasi ini menyediakan informasi bagi setiap satuan tugas dalam berbagai level manajemen, sehingga dapat lebih produktif.”

Dari uraian-uraian tujuan sistem informasi akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi bertujuan untuk menyimpan dan mengumpulkan data yang digunakan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan.

2.1.3.5. Pengguna Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi memberikan manfaat bagi penggunanya baik pengguna internal maupun pengguna eksternal sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Menurut Mardi (2011:11) menyebutkan pihak-pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi perusahaan terdiri dari:

1. “Pihak internal perusahaan. Kelompok ini terdiri para manajer yang dalam kapasitasnya di perusahaan memerlukan informasi sesuai bentuk tugas dan tanggung jawabnya, mereka membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIA. Apabila informasi yang mereka peroleh dapat menunjang tugasnya, maka kinerja perusahaan akan meningkat.
2. Para pengguna internal meliputi pihak manajemen di tiap tingkat dalam perusahaan, serta personel operasional. Berdasarkan pada apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Para desainer sistem, termasuk para akuntan, harus menyeimbangkan keinginan berbagai pengguna internal dengan sisi hukum dan ekonomi seperti pengendalian dan keamanan yang memadai, akuntabilitas yang memadai, dan biaya untuk menyediakan berbagai bentuk alternatif informasi.”

Dapat disimpulkan bahwa pengguna sistem informasi akuntansi terdiri dari pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal dalam pemerintahan meliputi bendahara, kepala seksi, kepala bidang dan kepala dinas, sedangkan pengguna

eksternal meliputi inspektorat, BPK dan Bank. Sistem informasi akuntansi harus memberikan nilai atau manfaat yang berdasarkan pada harapan atau kebutuhan para pengguna internal instansi pemerintahan maupun pihak eksternal.

2.1.3.6. Unsur - unsur Sistem Informasi Akuntansi

Unsur – unsur/ komponen sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:207-309) yaitu:

1. “*Hardware* (Perangkat Keras), merupakan salah satu komponen dari sistem informasi akuntansi yang merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data bentuk informasi.
2. *Software* (Perangkat Lunak), merupakan kumpulan program yang digunakan untuk menjalankan komputer, sedangkan program merupakan kumpulan perintah – perintah komputer yang tersusun secara sistematis.
3. *Brainware* (Sumber Daya Manusia), merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan, pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi.
4. Prosedur, merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang – ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada saat prosedur diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan situasi maka prosedur akan menjadi pedoman dalam menentukan aktivitas untuk menjalankan fungsi tertentu.
5. *Database*, merupakan fakta baik dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi.
6. Jaringan Komunikasi, merupakan penggunaan media elektronik untuk memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain yang berbeda. Sistem telekomunikasi merupakan kumpulan *hardware* dan *software* yang sesuai (*compatible*) yang disusun untuk mengkomunikasikan berbagai macam informasi.”

Menurut Romney dan Steinbart (2015:11) enam komponen dari sistem informasi akuntansi:

1. “Orang yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA.
6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA.”

Dengan demikian dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya operator yang menjalankan sistem harus berpedoman pada prosedur - prosedur dan didukung oleh infrastruktur terkonologi seperti software, komputer, dan peralatan pendukung lainnya, tanpa itu sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik.

2.1.4. Kualitas Laporan Keuangan

2.1.4.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Setiap organisasi publik maupun non-publik diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Laporan keuangan tersebut harus mengacu pada standar yang berlaku serta memenuhi karakteristik yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para

gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan daerah adalah suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode (Nordiawan, dkk 2012). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Zaki Baridwan (2010:4) menyatakan informasi dapat dikatakan berkualitas bila memenuhi beberapa karakteristik, sebagai berikut:

“Kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama yaitu relevan dan dapat dipercaya (*reliability*). Agar informasi itu relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*), dan tepat waktu. Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Disamping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder dan interaktif yaitu dapat dibandingkan dan konsisten.”

Menurut Indra Bastian (2010:9) pengertian kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.

Menurut Mahmudi (2016:13) mendefinisikan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.”

Menurut Hery (2012:2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.”

Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan:

“Laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

2.1.4.2. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. “Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendabai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.”

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau deficit-laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan kas suatu entitas pelaporan. Dengan adanya penjelasan dari PP no 71 tahun 2010 yang menyatakan:

“CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.”

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri

lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauhmana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut. Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

2.1.4.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen tersebut sebagai berikut:

1. “Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.”

Berikut dijelaskan secara rinci masing-masing laporan keuangan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial menurut berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan dan juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Unsur-unsur penyajian dalam LRA adalah:

- a. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer merupakan penerimaan atas pengeluaran dari satu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus/defisit LRA

Surplus/defisit LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja yang ada dalam LRA selama satu periode.

e. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang perlu diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

SILPA/SIKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun dan menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

- a) Saldo Anggaran Lebih;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih akhir.

Selanjutnya rincian unsur-unsur dalam Laporan perubahan saldo Anggaran Lebih terdapat pada Catatan atas Laporan Keuangan

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Unsur-unsur yang terdapat dalam neraca meliputi :

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah daerah dari peristiwa/kejadian masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan. Aset tersebut diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset tidak lancar.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah. Dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- c. Ekuitas, dihasilkan dari selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan yang merupakan kekayaan bersih pemerintah.

3. Laporan operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO dan beban operasional, surplus/deficit non operasional, pos luar biasa, dan surplus/deficit LO.

- a. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
- c. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- d. Kegiatan non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin.
- e. Surplus/deficit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan atau pengurangan surplus/deficit dari kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional.

- f. Pos luar biasa merupakan pendapatan/beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau operasi yang tidak biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- g. Surplus/defisit LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan dan setelah diperhitungkan dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional serta pos luar biasa.

4. Laporan Arus Kas

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas serta kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

- a. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
- b. Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- c. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan, baik dalam jumlah maupun komposisi utang dan piutang jangka panjang.

- d. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan seperti penerimaan/pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

6. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Suardjono (2012:101) menyatakan pelaporan keuangan sebagai berikut:

“Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomi dan social negara. Dalam PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Bagian KKAP paragraph 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.”

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

2.1.4.4. Pengguna Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. “Masyarakat.
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.”

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh 35 ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

2.1.4.5. Karakteristik Kualitatif Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa :

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan, dan
4. Dapat dipahami

Berikut penjelasan dari keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan di atas adalah:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan :

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang data mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian uang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada

kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rukmi Juwita (2013)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi	Hasil Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi	Persamaannya terletak pada variabel independen yaitu implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu penelitian sebelumnya dilakukan pada wilayah Kabupaten/Kota

		Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.	akuntansi serta variabel dependen kualitas laporan keuangan.	di Provinsi Jawa Barat, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung dan peneliti menggunakan teori yang lebih baru.
2.	Heni Nurani H, dkk (2014)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (survey pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.	Persamaannya terletak pada variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan variabel independen yaitu kualitas laporan keuangan.	Perbedaannya terletak pada variabel independen, peneliti hanya meneliti penerapan standar akuntansi pemerintahan sedangkan penulis menambahkan variabel independennya yaitu sistem informasi akuntansi.

3.	Berry Wan Saputra (2015)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada SKPD Kota Pekanbaru	Hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.	Persamaannya terletak pada variabel independen implementasi standar akuntansi dan sistem informasi akuntansi serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.	Perbedaannya terletak pada variabel independen, karena peneliti memiliki 3 variabel independen sedangkan penulis hanya memiliki 2 variabel independen.
4.	T. Asri	Pengaruh	Hasil penelitian menunjukkan	Persamaannya terletak pada	Perbedaannya terletak pada

	Yunita (2015)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada SKPD Kota Dumai)	bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai.	variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.	variabel independen yaitu sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi sedangkan penulis memiliki variabel independen implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi.
5.	Mia Oktarina, dkk (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan <i>good</i>	Persamaannya terletak pada variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan variabel dependen	Perbedaannya terletak pada variabel independen yaitu kualitas aparatur pemerintah daerah dan <i>good governance</i> ,

		Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan <i>Good</i> <i>Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang	<i>governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	yaitu kualitas laporan keuangan.	sedangkan penulis memiliki variabel independen implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi.
--	--	--	--	-------------------------------------	--

2.2. Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang berguna bagi kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan harus disusun secara baik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

2.2.1. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Adapun pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut Mahmudi (2011:271) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

“Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.”

Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus sesuai dengan SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010). Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2010:22-23).

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah, hal ini memberikan informasi bahwa laporan keuangan Pemerintah akan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan juga dapat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian (Rukmi Juwita, 2013) menunjukkan terdapat pengaruh

yang signifikan implementasi SAP terhadap kualitas laporan keuangan, dengan implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan, karena dapat mengantisipasi dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan serta terwujudnya informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh dalam penyajian laporan keuangan.

2.2.2. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Diani (2014) menyatakan pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem informasi yang baik untuk penyampaian dan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan.”

Penelitian Rukmi Juwita (2013) menunjukkan bahwa:

“Sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa sistem informasi akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.”

Penelitian Silviana (2013) menyatakan bahwa:

“Penerapan SIA memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang terintegrasi dalam menghasilkan laporan keuangan.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan, karena memiliki kontribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan serta membantu dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

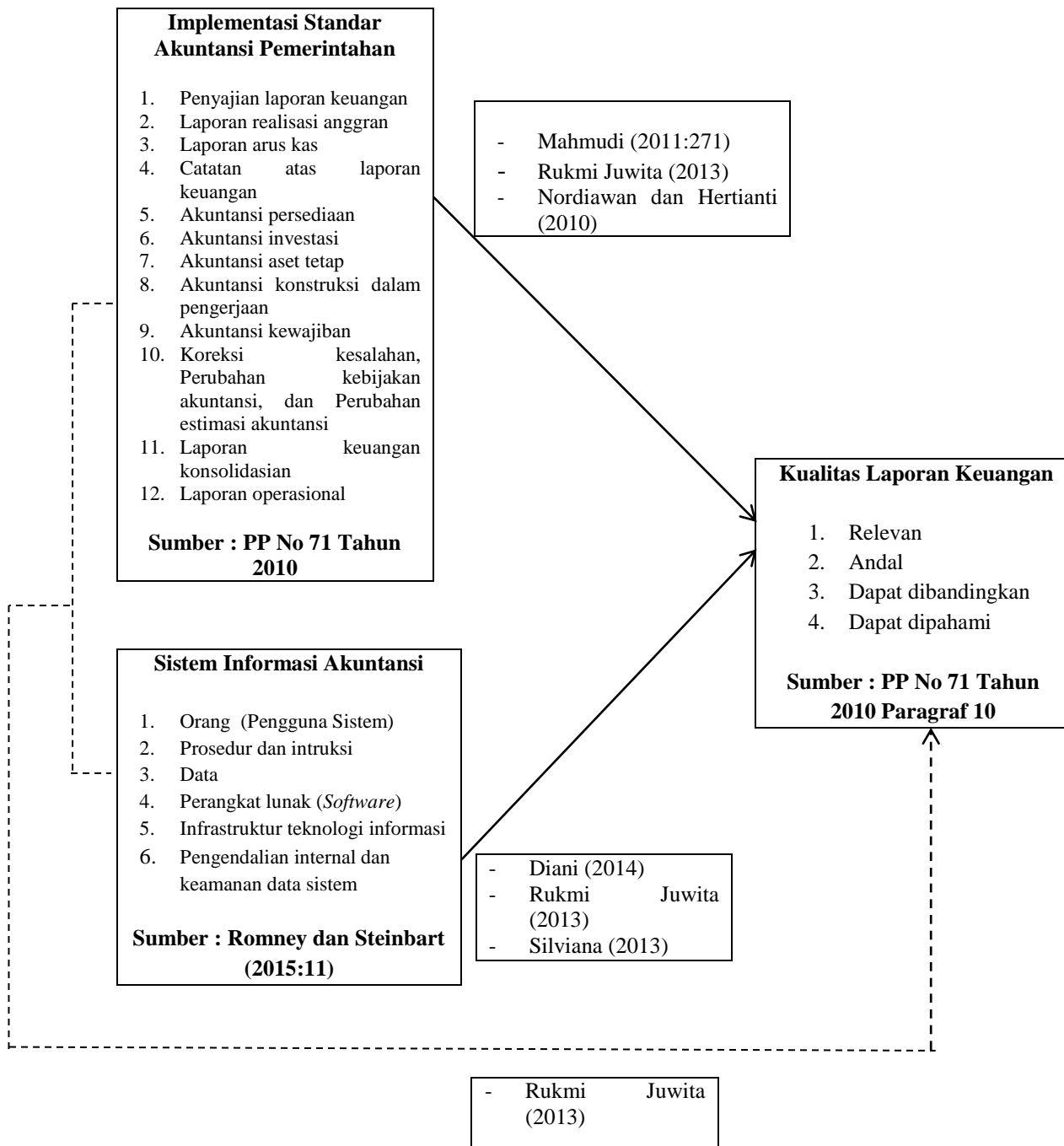
2.2.3. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Rukmi Juwita (2013) bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemda Jawa Barat menunjukkan bahwa dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagian besar telah dilakukan dengan baik dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat merepresentasikan kondisi keuangan pemerintah dengan cukup baik. Sistem informasi akuntansi yang dilakukan Pemda Jawa Barat menunjukkan bahwa komponen – komponen dalam sistem informasi

akuntansi yang digunakan sebagian besar telah menunjukkan kualitas yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sangat membantu dan sangat memadai sehingga dapat mendukung dengan cukup baik laporan keuangan yang disajikan.

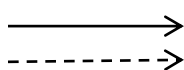
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan, dengan adanya implementasi standar akuntansi pemerintahan dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan sistem informasi akuntansi memberikan dampak yaitu mempermudah dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Keterangan :



: Pengaruh Parsial

: Pengaruh Simultan

2.3. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2014:64) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- H₂ : Terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- H₃ : Terdapat pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.